

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah pembangunan dari, oleh, dan untuk masyarakat, dilaksanakan disemua aspek kehidupan bangsa. Pembangunan dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang saling menunjang. Sedangkan dibidang pendidikan pemerintah berupaya menyelenggarakan program pemberdayaan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada dasarnya tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui penyebaran dan pelaksanaan hasil pembangunan secara merata di semua tingkatan daerah. Proses pencapaian tujuan pembangunan secara global ini tidak terlepas dari proses pembangunan awal yang dimulai dari pembangunan masyarakat baik masyarakat perkotaan maupun masyarakat pedesaan. Pembangunan masyarakat yang dimaksud adalah upaya terencana dan sistematis yang dilakukan oleh, untuk, dan dalam masyarakat guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.

Dilihat dari segi demografis, sebagian besar masyarakat Indonesia bermukim di pedesaan, namun hal ini belum diikuti oleh terjaminnya berbagai aspek kebutuhan hidup masyarakatnya terutama dalam bidang pendidikan, bahkan perkembangan masyarakatnya yang cenderung masih statis dan masih terikat oleh adat-istiadat, serta belum optimalnya sentuhan pendidikan yang diterima cenderung menimbulkan asumsi bahwa masyarakat pedesaan senantiasa identik dengan kemiskinan dan kebodohan.

Pengembangan dan implemantasi Sistem Pendidikan Nasional melalui 3 jalur sistem pendidikan yakni Pendidikan Formal, Non formal dan Informal diharapkan mampu meningkatkan mutu masyarakat dalam bidang pendidikan, khususnya masyarakat pedesaan. Dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ditegaskan bahwa pendidikan non formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan

yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat (Depdiknas, 2006: 19).

Mengacu pada paradigma bahwa maju mundurnya suatu bangsa tergantung dari tingkat pendidikan masyarakatnya, maka pengembangan pendidikan non formal sangat diperlukan agar benar-benar mampu menyentuh masyarakat yang membutuhkan. Pendidikan non formal sebagai salah satu sistem Pendidikan Nasional mempunyai kedudukan sebagai pelengkap pendidikan formal dan lebih bersifat fleksibel, hal ini sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat. Sejalan dengan hal itu, Sudjana (2004: 39) menjelaskan bahwa dibandingkan dengan pendidikan formal, pendidikan non formal memiliki beberapa keunggulan yaitu: *pertama*, biaya penyelenggaraannya relatif murah dibandingkan dengan biaya yang digunakan dalam pendidikan formal. *Kedua*, program pendidikan non formal lebih berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. *Ketiga*, pendidikan non formal memiliki program yang fleksibel.

Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 26 ayat (3) dinyatakan bahwa: Pendidikan non formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan fungsional), pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Dari pernyataan ini dapat dipahami bahwa pendidikan keaksaraan (keaksaraan fungsional) merupakan bagian dari program/kegiatan pendidikan non formal.

Program Keaksaraan fungsional merupakan bentuk layanan Pendidikan Non Formal yang bertujuan untuk membelajarkan warga masyarakat penyandang buta aksara agar memiliki kemampuan menulis, membaca dan berhitung, yang berorientasi pada kehidupan sehari-hari dengan memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan sekitarnya sehingga peserta didik dan masyarakat dapat meningkatkan mutu dan taraf hidupnya (Depdiknas, 2006: 64).

Berkaitan dengan azas relevansi pembangunan, maka pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui jalur pendidikan non formal yang

dilaksanakan melalui program Keaksaraan Fungsional (KF) sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan mutu masyarakat pedesaan menuju masyarakat madani. Pendidikan non formal ini merupakan bentuk pelayanan pendidikan kepada masyarakat yang disebabkan oleh berbagai hal tidak memperoleh kesempatan untuk memperoleh pendidikan pada jalur formal sehingga mereka memiliki pengetahuan, keterampilan yang relatif minim.

Program keaksaraan fungsional merupakan program yang substansi belajarnya disesuaikan dengan kebutuhan dan minat belajar warga belajar yang disesuaikan dengan potensi lingkungan yang ada di sekitar warga belajar. Hasil yang diharapkan dari program ini adalah agar warga belajar (masyarakat) dapat memanfaatkan hasil belajarnya dalam kehidupan sehari-hari guna peningkatan kualitas kesejahteraan hidupnya. Program ini sebenarnya bukan merupakan hal yang baru, bahkan bisa diprediksi bahwa program ini sudah masuk ke sebagian besar wilayah pedesaan yang ada di Indonesia termasuk di desa Sidoharjo tempat penelitian ini dilaksanakan.

Desa Molantadu adalah salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara. Secara geografis, umumnya lokasi pemukiman penduduk desa ini merupakan dataran tinggi, sehingga berpotensi rawan bencana alam seperti gempa bumi, erosi, pendangkalan, dan banjir. Sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah petani/buruh tani, mereka bertempat tinggal di lokasi-lokasi yang relatif jauh dari pusat desa. Kondisi lokasi inilah yang menyebabkan tidak semua penduduk yang ada di Desa Molantadu bisa menikmati pendidikan di bangku sekolah, sehingga selama ini mereka menjalani kehidupan sehari-hari dengan bekal pengetahuan dan keterampilan yang relatif minim.

Data yang diperoleh dari pemerintah setempat menunjukkan bahwa jumlah penduduk Desa Molantadu berjumlah 1082 jiwa. Dilihat dari segi tingkatan pendidikan, jumlah ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut: Jumlah penduduk usia sekolah (Paud, SD, SMP, SMU dan Perguruan Tinggi) adalah 30,05%, tamatan Sarjana 0,25%, tamatan SMU 0,65%, tamatan SMP 1,82%, tamatan SD 21,05%, dan sisanya adalah yang *drop out* dari bangku SD dan tidak pernah

duduk di bangku sekolah yakni sebesar 46,18% (Sumber: Profil Desa Molantadu Kecamatan Titidu Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2014). Banyaknya angka penduduk *Drop out* (Do) dan tidak pernah duduk di bangku sekolah, yang hampir mencapai 50% ini disebabkan oleh minimnya jumlah sarana pendidikan yang terdapat di Desa Molantadu, hal ini ditunjukkan oleh data profil pendidikan Tahun 2014 bahwa di Desa Molantadu hanya terdapat 3 buah TPA, 1 buah PAUD, dan 1 buah MI (Madrasah Ibtidaiyah). Dengan kondisi seperti ini, Desa Molantadu akan mengalami hambatan dalam proses peningkatan dan pengembangan desa terutama dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui lembaga-lembaga pendidikan, oleh karenanya perlu adanya suatu program pendidikan yang dapat mengimbangi dan membantu peran pendidikan formal sehingga hal ini dapat mengurangi jumlah penduduk yang buta huruf.

Pada tahun 2010, program keaksaraan fungsional mulai masuk ke wilayah Desa Molantadu Kecamatan Titidu. Sebagai masyarakat yang sangat membutuhkan pendidikan, masuknya program keaksaraan fungsional merupakan kesempatan besar bagi masyarakat Desa Molantadu karena mereka menyadari bahwa program ini akan membawa mereka kepada proses transformasi dari kondisi saat ini menuju kondisi yang lebih maju.

Program Keaksaraan Fungsional merupakan program pendidikan non formal yang pelaksanaannya memerlukan dukungan sepenuhnya dari masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip pendidikan non formal yakni pendidikan yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang artinya bahwa program keaksaraan fungsional ini timbul karena faktor kebutuhan masyarakat, pelaksanaannya adalah masyarakat dan hasilnya untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Program Keaksaraan Fungsional akan dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan apabila proses pelaksanaannya dilaksanakan dengan optimal dengan memberdayakan berbagai unsur masyarakat yang ada. Pemberdayaan berbagai unsur masyarakat ini sejalan dengan prinsip pembangunan yang partisipatif dimana masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam pelaksanaan pembangunan. Pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat lokal tidak hanya berkaitan dengan pengembangan program

keaksaraan fungsional semata, akan tetapi juga bertujuan untuk menggali potensi masyarakat dan secara tidak langsung turut membantu meningkatkan rasa percaya diri dan rasa tanggung jawab masyarakat itu sendiri. Adapun unsur-unsur masyarakat desa yang perlu diberdayakan dalam pengembangan program keaksaraan fungsional ini adalah tokoh-tokoh sosial masyarakat, unsur pemerintah desa serta unsur-unsur Organisasi Kemasyarakatan di desa.

Organisasi PKK sebagai salah satu organisasi masyarakat yang ada di desa memiliki peran yang sangat penting dalam upaya menumbuhkan partisipasi masyarakat baik dalam kegiatan pembangunan desa maupun dalam kegiatan peningkatan mutu masyarakat. Dengan basis keterampilan yang dimiliki seyogyanya organisasi PKK mampu membekali masyarakat dengan berbagai jenis keterampilan, dan dengan potensi kodrati kewanitaan yang dimiliki organisasi ini diharapkan mampu mengajak dan membimbing masyarakat untuk terus belajar dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa pemberdayaan organisasi PKK dalam pelaksanaan program kegiatan keaksaraan fungsional di Desa Molantadu ini belum maksimal. Hal ini terlihat dari sebagian besar ibu-ibu yang tergabung dalam organisasi PKK belum memberikan perhatian yang optimal terhadap kondisi masyarakat yang mengalami keterbelakangan pendidikan, misalnya dengan membentuk kelompok-kelompok kecil untuk dibina dan dibelajarkan dengan berbagai keterampilan, ataupun membelajarkan masyarakat yang buta aksara yang dimediasi oleh perkumpulan seperti majelis taklim. Selain itu, gerakan ataupun gagasan-gagasan yang dilakukan pemerintah dalam rangka memotivasi organisasi masyarakat agar aktif dalam kegiatan keaksaraan fungsional juga belum dilaksanakan. Masalah lain yang dihadapi adalah belum tersedianya kader PKK yang dianggap mampu membina dan membelajarkan keterampilan kepada masyarakat, sehingga tutor keaksaraan fungsional di Desa Molantadu ini masih didominasi oleh tenaga tutor dari luar desa.

Informasi lain yang diperoleh adalah kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dan kepedulian pemerintah untuk memberdayakan organisasi sosial

masyarakat dalam pelaksanaan dan pengembangan program keaksaraan fungsional di Desa Molantadu ini belum optimal, hal ini tercermin dari adanya anggapan sebagian masyarakat bahwa tugas untuk membelajarkan warga belajar adalah tugas dari tutor-tutor tertentu terutama yang berprofesi sebagai guru. Anggapan seperti ini melahirkan sikap pesimis dimasyarakat sehingga mereka kurang berpartisipasi dan memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan keaksaraan fungsional di Desa Molantadu Kecamatan Titidu Kabupaten Gorontalo Utara.

Faktor lain yang menyebabkan kurang optimalnya pemberdayaan masyarakat di Desa Molantadu yakni belum dilibatkannya masyarakat terutama organisasi-organisasi kemasyarakatan dalam pengambilan keputusan baik dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan maupun dalam pengawasan sehingga hal ini menimbulkan adanya persepsi bahwa segala kegiatan yang ada di desa termasuk kegiatan keaksaraan fungsional adalah tanggung jawab dari pihak pemerintah.

Kondisi ini perlu segera diatasi agar masyarakat dapat berdaya guna dalam kehidupan sehari-hari. Jika tidak segera diatasi, maka di masa-masa mendatang masyarakat khususnya yang berada di pedesaan tidak akan mampu bersaing dalam situasi perkembangan dunia yang terus meningkat, mereka akan mengalami keterbelakangan baik dalam segi pengetahuan, keterampilan, pengalaman serta tidak memiliki kemauan untuk berkembang, sehingga hal ini akan mempengaruhi upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang pada gilirannya akan berdampak pada kemajuan bangsa.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan kegiatan penelitian yang komprehensif dan diformulasikan dengan judul: **Pemberdayaan Organisasi PKK dalam Melaksanakan Kegiatan Keaksaraan Fungsional di Desa Molantadu Kecamatan Titidu Kabupaten Gorontalo Utara.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana pemberdayaan organisasi PKK dalam melaksanakan kegiatan Keaksaraan Fungsional di Desa Molantadu Kecamatan Titidu Kabupaten Gorontalo Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pemberdayaan organisasi PKK dalam melaksanakan kegiatan Keaksaraan Fungsional di Desa Molantadu Kecamatan Titidu Kabupaten Gorontalo Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

- a) Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah setempat khususnya dalam upaya pemberdayaan organisasi PKK dalam pelaksanaan kegiatan keaksaraan fungsional di Desa Molantadu Kecamatan Titidu Kabupaten Gorontalo Utara.
- b) Membantu peneliti dan akademisi dalam mengembangkan kemampuan penulisan karya ilmiah sebagai informasi kepada dunia pendidikan akan pentingnya pemberdayaan organisasi PKK dalam melaksanakan kegiatan Keaksaraan Fungsional di Desa Molantadu Kecamatan Titidu Kabupaten Gorontalo Utara.

2. Secara Praktis

- a) Memberikan pengetahuan secara praktis tentang pemberdayaan organisasi PKK dalam melaksanakan kegiatan Keaksaraan Fungsional di Desa Molantadu Kecamatan Titidu Kabupaten Gorontalo Utara.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dalam meningkatkan pemberdayaan organisasi PKK dalam melaksanakan kegiatan Keaksaraan Fungsional di Desa Molantadu Kecamatan Titidu Kabupaten Gorontalo Utara.